

# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018**

*Disampaikan oleh:*

**Ir. Yerry Yanuar, MM**

**Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat**

**Cirebon, 16 Februari 2017**

*Sukses Perencanaan Sukses Implementasi*



**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**



# SISTEMATIKA PAPARAN

**1**

Pendahuluan

**2**

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2015 - 2016

**3**

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

**4**

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

**5**

Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018



**1**

## **Pendahuluan**

# SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025

RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

## 5 NILAI-NILAI LUHUR :

1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN

## 7 KARAKTER :

1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT

## ● SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025



ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

# JAWA BARAT GREEN PROVINCE



# VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025

DAN

## VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

**VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025**  
**DENGAN IMAN DAN TAKWA,**  
**PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA**



### **TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI** **Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025**

1. **PENYELENGGARAAN** Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing **TINGGI**.
3. **PENGELOLAAN** Pertanian dan Kelautan.
4. Energi Baru dan **TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**.
5. **Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF**.
6. *Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.*
7. **Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.**

**VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN 2013-2018**

**JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**

#### **MISI**

##### **MISI PERTAMA :**

**Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing**

##### **MISI KEDUA :**

**Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**

##### **MISI KETIGA :**

**Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik**

##### **MISI KEEMPAT :**

**Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**

##### **MISI KE LIMA :**

**Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal**

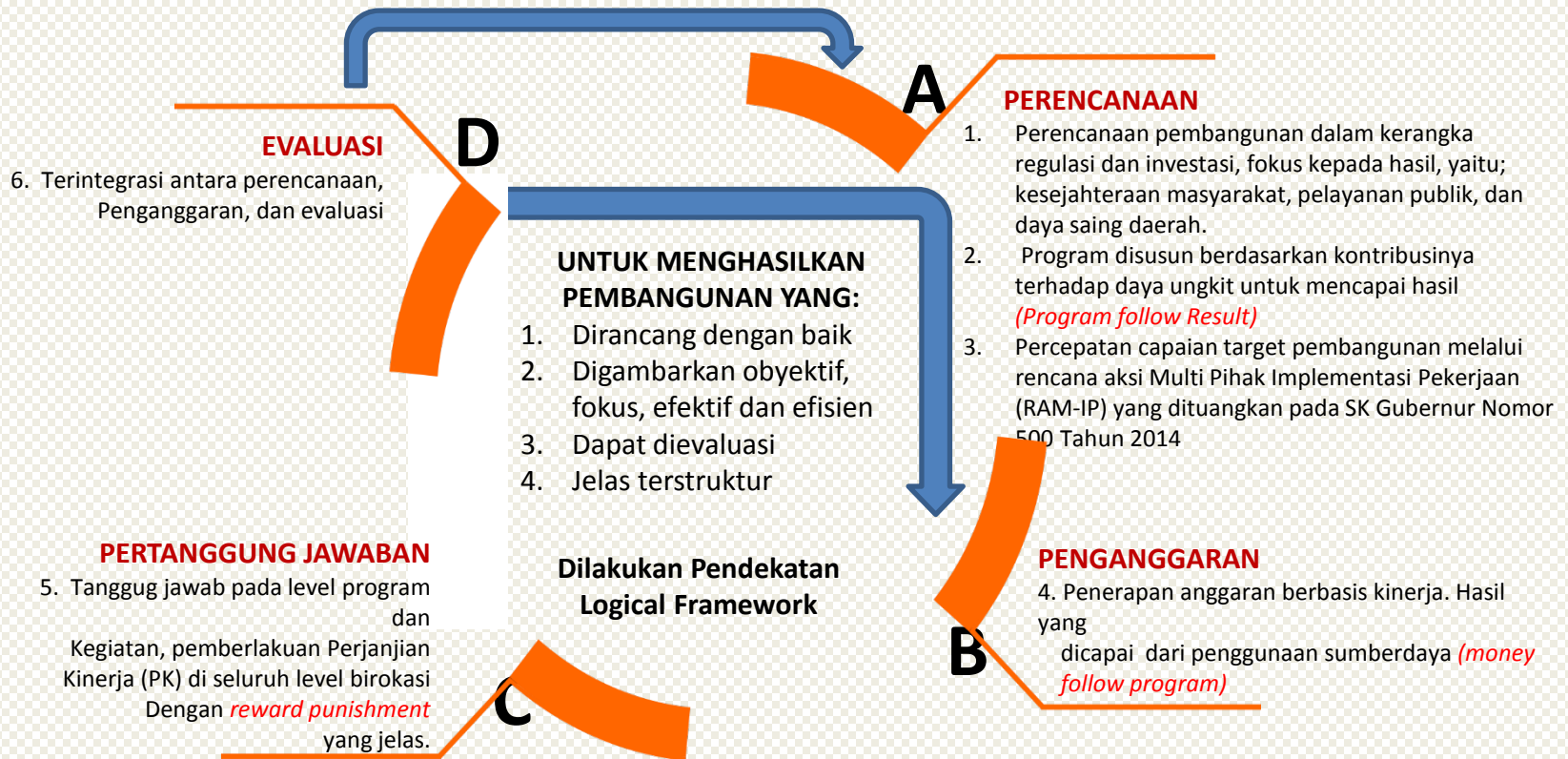


# JANJI GUBERNUR JAWA BARAT



1. PENDIDIKAN **GRATIS SD, SLTP DAN SLTA** DI SELURUH JAWA BARAT.
2. **BEASISWA** PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLET BERPRESTASI DAN GURU
3. REVITALIASI **POSYANDU** DAN **DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU**
4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA **BARU** DAN MENCETAK **100.000 WIRUSAHAAN BARU** JAWA BARAT
5. ALOKASI **4 TRILIYUN** UNTUK **INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN**
6. REHABILITASI 100.000 **RUMAH** RAKYAT MISKIN
7. PEMBANGUNAN **PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT** DI **KABUPATEN/ KOTA**
8. PEMBANGUNAN **GELANGGANG OLAHRAGA** DI **KABUPATEN/ KOTA**

# ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA



Sumber : Ahmad Heryawan; 2016

# INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT



Sumber : Ahmad Heryawan,2016





## Rekomendasi **BPK RI** terkait Pemeriksaan Proses Perencanaan Tahun 2014 – 2016

- Proses Perencanaan dan Penganggaran harus **SESUAI JADWAL** yang telah ditetapkan disertai **REKAM JEJAK** pada setiap tahapan.
- Setiap usulan kegiatan harus **DILENGKAPI** dengan **SURAT PENGANTAR** dan **PROPOSAL** (baik BL maupun BTL).
- Perubahan usulan Kegiatan disertai dengan perubahan **PROPOSAL** dan **BERITA ACARA**.
- Penentuan **LOKASI** pada setiap kegiatan harus spesifik (jelas dan terukur).

**PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018  
DIKAWAL OLEH KPK !!!  
(TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT ADMINISTRASI)**



**2**

**Capaian Kinerja Pembangunan  
Tahun 2015 - 2016**

# JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL

## POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :

- **JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2016, Proyeksi BPS)**
- **PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL**
- **INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA**
- **BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA**
- **MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P**
- **MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS**
- **MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM**

## KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :

- **BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL 2015 : 13,22%**
- **KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015 : 27,28%**

## KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :

- **LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI**
- **PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI**
- **PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW**
- **LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)**
- **MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**
- **MERUPAKAN TUJUAN WISATA**
- **DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M<sup>3</sup>/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M<sup>3</sup>/TAHUN**

## KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :

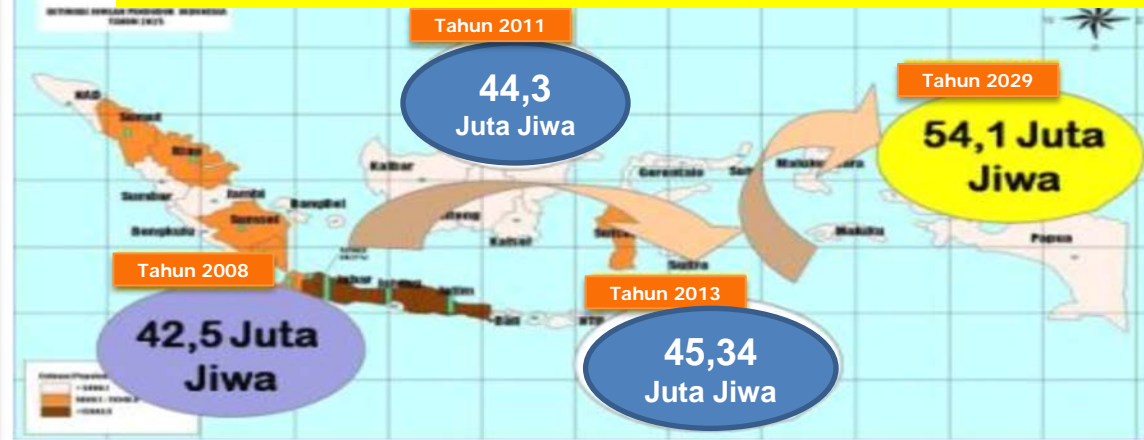
- **PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI**
- **PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI**
- **PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI**

**Luas Jawa Barat :**  
3.709.528,44 ha

# PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2015)



## Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk



- Kabupaten/Kota : 27
- Luas : 3.709.528,44 Ha
- Kecamatan : 626
- Kelurahan : 641
- Desa : 5.321

### Penduduk

- LPP : 1,52%
- Indonesia (2015) : 255.461.700 Jiwa
- Jabar (2015) : 46.71 Jiwa
- Penduduk Miskin (2015) : 9,57 %

- Kemantapan Jalan : 97,80%
- Rasio elektrifikasi : 94,04%
- Pelayanan Air Minum : 67,13%
- Irigasi Kondisi Baik : 69,65%
- Kawasan Lindung : 37,40% (2014)

- PDRB (2015) : Rp.1.525,15 Trilyun (adhb);
- PDRB per kapita (2015) : Rp.32.65 Juta (adhb)
- Inflasi (2015) : 2.73%
- LPE (2015) : 5,03%
- IPM (2015) : 69.50% (MB)
- RLS (2015) : 7,86 th (MB)
  
- AHH (2015) : 72,41 th
- APK PAUD : 64.11 % (2014 - 2015)\*
- APK SD : 109.42 % (2014 - 2015)\*
- APK SMP : 98.91 % (2014 - 2015)\*
- APK SMA : 62.11 % (2014 - 2015)\*
- APK PT : 17,47 % (2013 - 2014)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan \*Kemendikbud

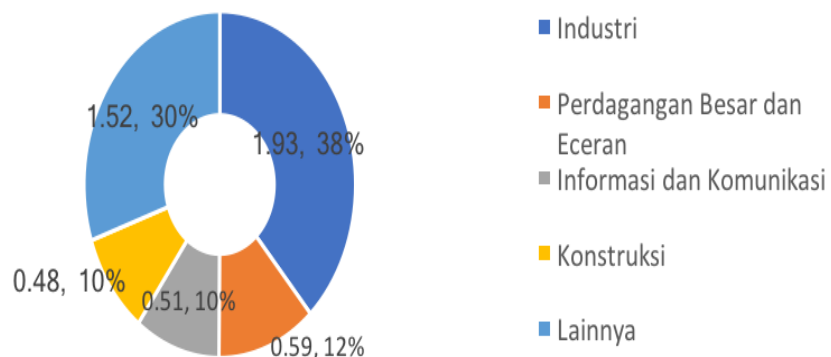




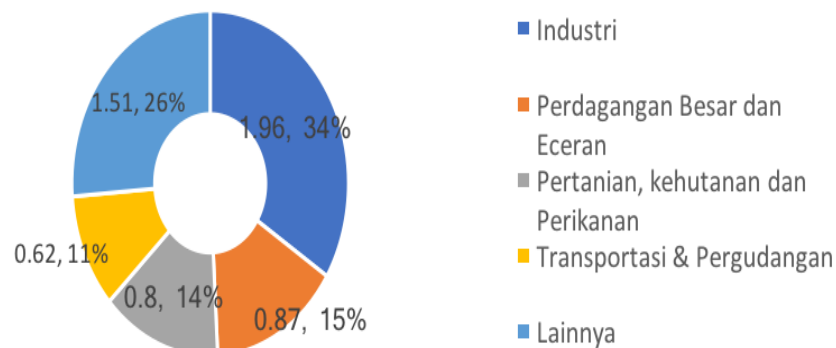
# PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT TAHUN 2015 & 2016

## Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (Persen)

2015



2016

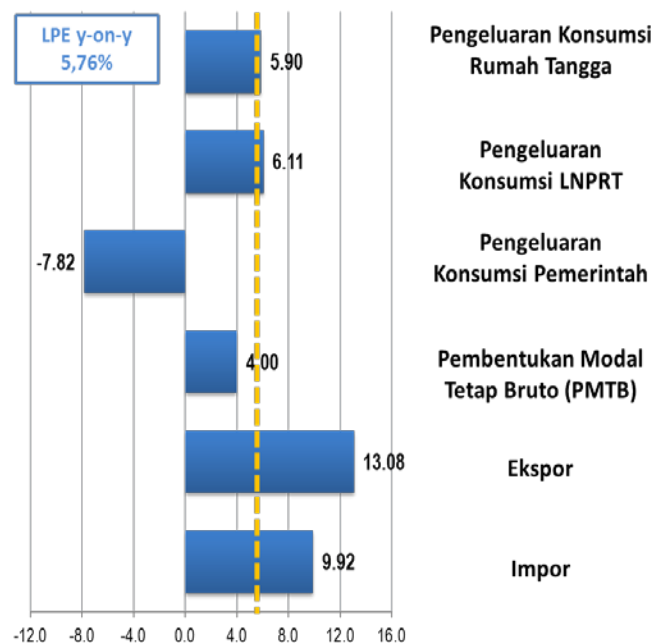


Hingga triwulan III, laju pertumbuhan ekonomi terbesar dari lapangan usaha perekonomian Jawa Barat ada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 13,66%), lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha jasa keuangan dan transportasi - 12,99% dan 10,25%.

dilihat dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja terjadi pada hampir seluruh komponen, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 13,08 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,11 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,90 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,00 persen dan Perubahan Inventori sebesar 3,75 persen

## Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)

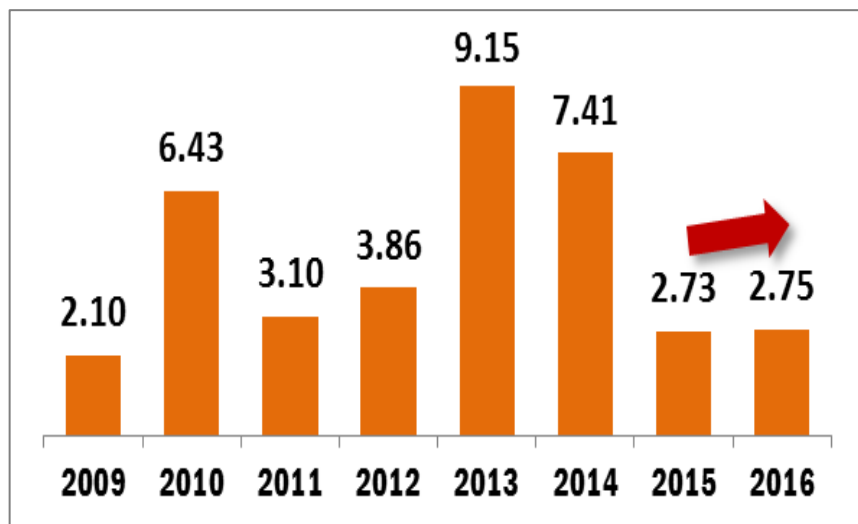
Pertumbuhan Ekonomi  
y-on-y (%)



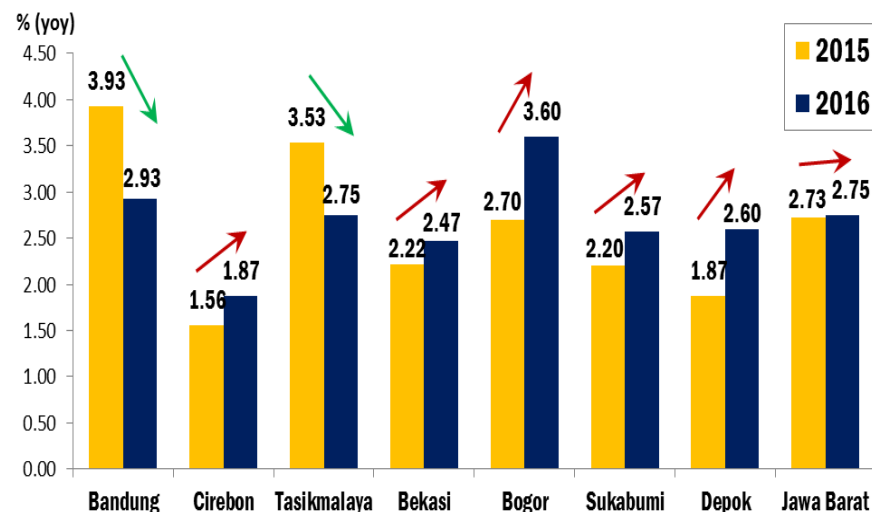


# STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (1)

Perkembangan Inflasi IHK Tahunan (yoy)



Perkembangan Inflasi Spasial 2015 dan 2016 (% , yoy)



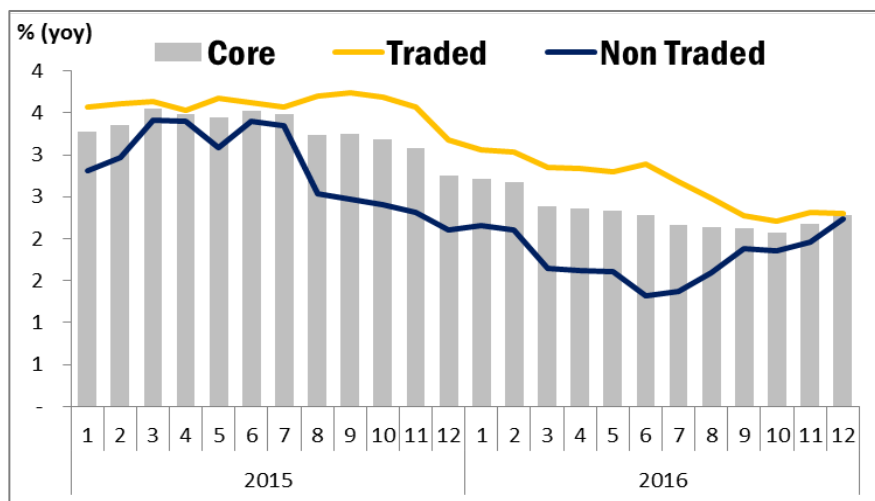
- Inflasi IHK Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 2,75% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2015 sebesar 2,73% (yoy). Namun demikian realisasi ini masih lebih rendah dibanding rata-rata historis inflasi tahunan 2011-2015 sebesar 5,25% (yoy).

- Secara spasial, inflasi mayoritas kota perhitungan di Jawa Barat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 didorong oleh gejolak harga pangan, kecuali di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor (3,60%) dan terendah di Kota Cirebon (1,87%).

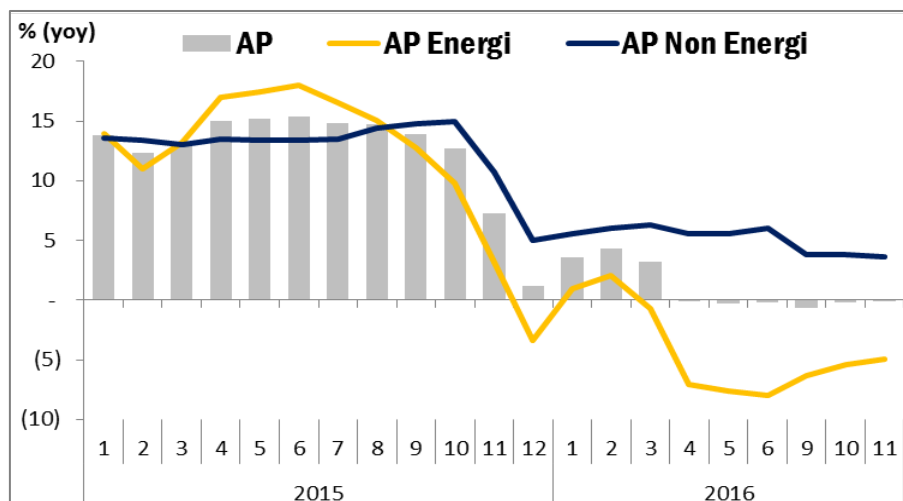


# STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (2)

## Perkembangan Komponen Inflasi Core



## Perkembangan Komponen Inflasi Administered Prices



- inflasi kelompok *core* tercatat menurun yakni dari 2,76% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 2,28% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi *core* historis 2011-2015 sebesar 3,66%. Rendahnya inflasi *core* terutama didorong oleh masih terbatasnya permintaan masyarakat di tengah *uncertainty* perekonomian

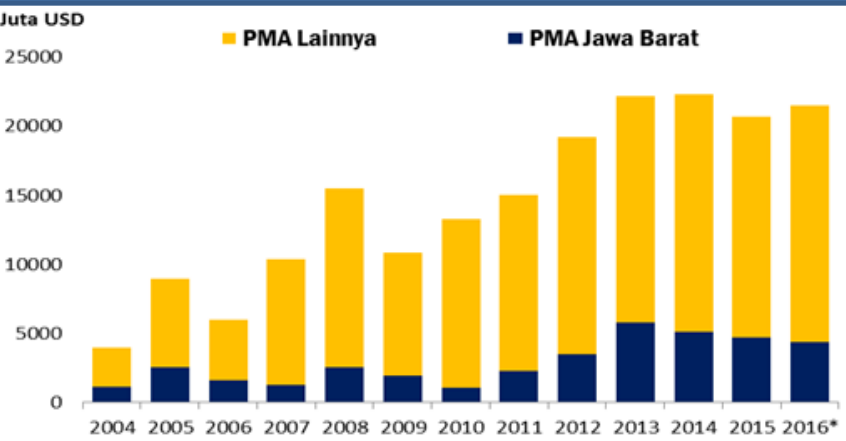
- Inflasi kelompok *administered prices* tercatat menurun yakni dari 1,18% (yoy) pada tahun 2015 menjadi -0,04% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi *core* historis 2011-2015 sebesar 7,46%. Rendahnya inflasi *administered prices* ini terutama didorong oleh penurunan pada kelompok AP energi.



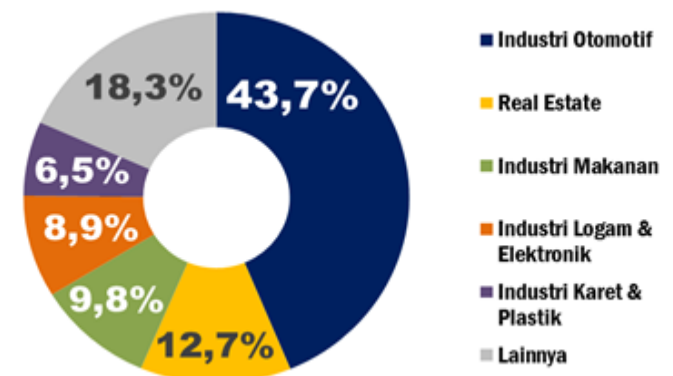
# REALISASI INVESTASI: PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN JAWA BARAT

Pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4 persen dan PMDN mencapai 14,1 persen.

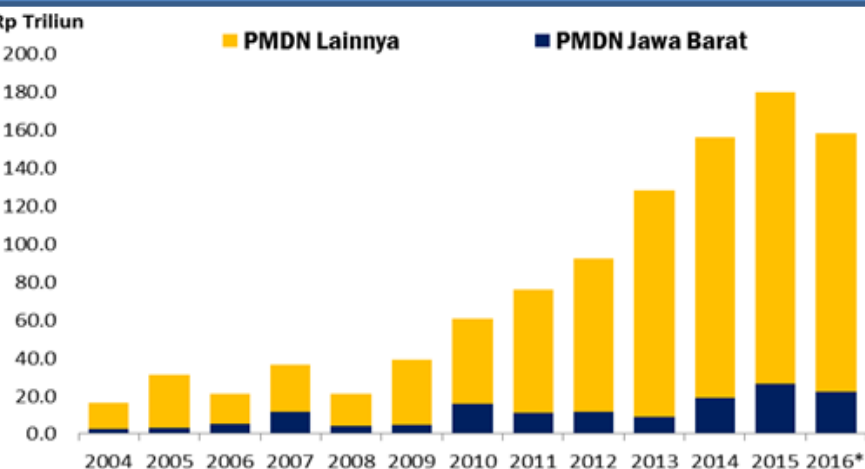
Perkembangan PMA di Jawa Barat, 2004 – 2016



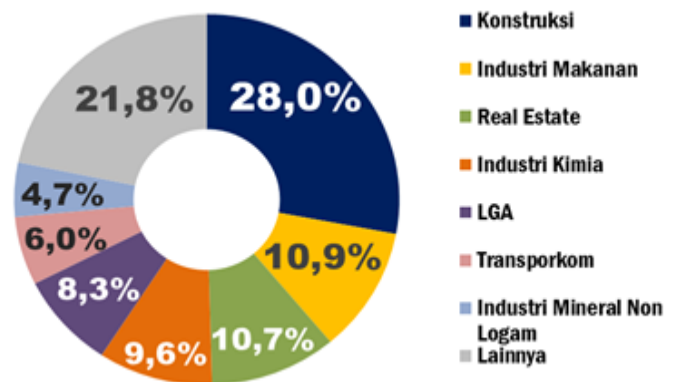
Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat



Perkembangan PMDN di Jawa Barat, 2004 – 2016



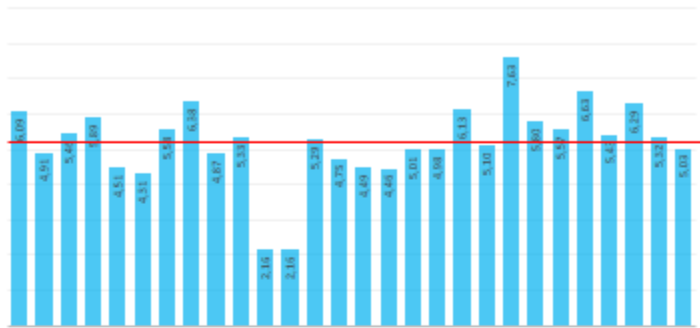
Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat



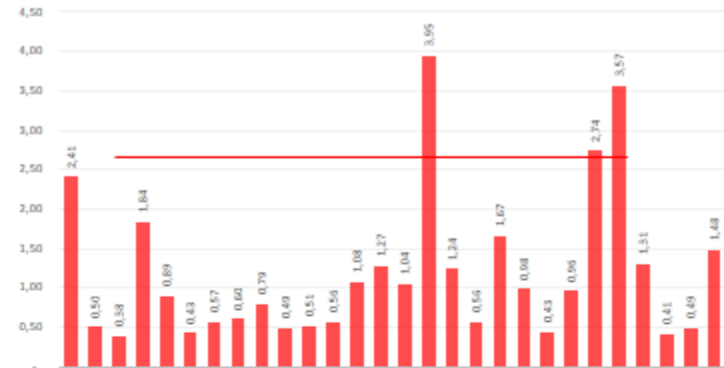


# Perkembangan Makro Kabupaten/Kota Tahun 2015

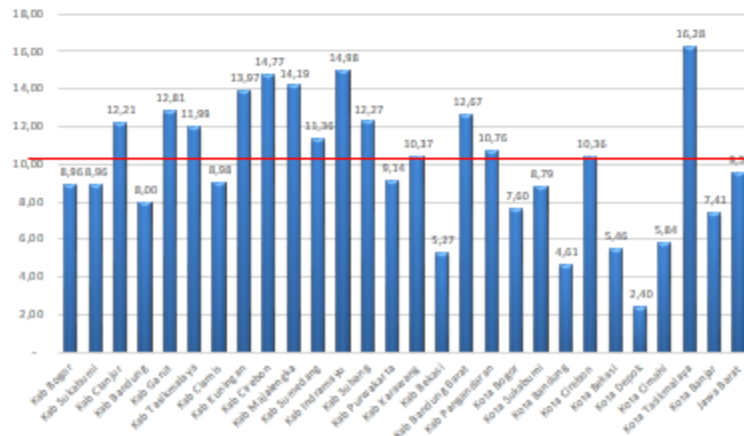
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT 2015



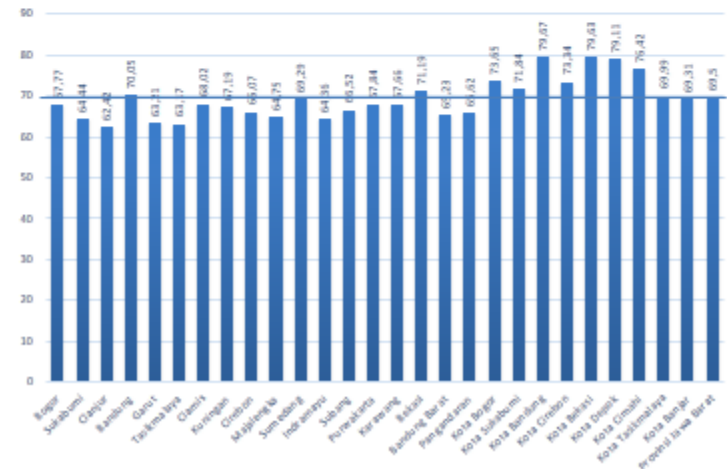
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT 2015



Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota Di Jawa Barat Tahun 2015

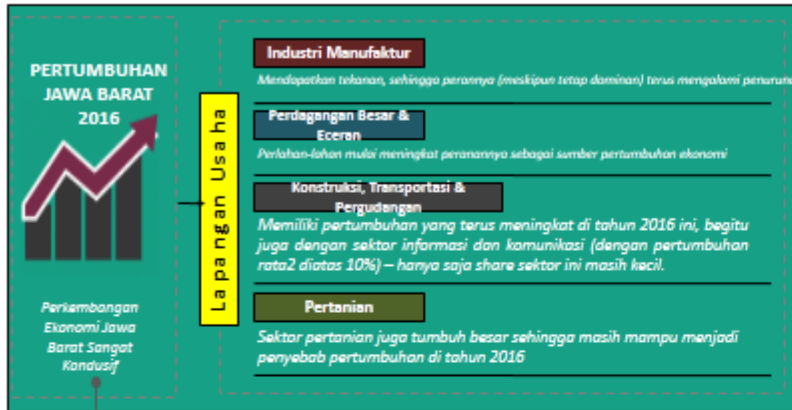


Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Di Jawa Barat Tahun 2015



# Kondisi Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016

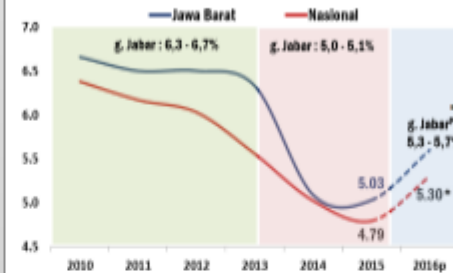
## Pertumbuhan Jawa Barat Tahun 2016



18

## Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 berkisar 6,02 % (yoy). Walaupun perlahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2016 (5,3%-5,7%) masih berada di bawah rata-rata historisnya, namun menunjukkan mulai adanya pemulihan pada kinerja perekonomian khususnya dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 yang tumbuh pada kisaran 3,0%-3,1%. Perekonomian Jawa Barat sejak tahun 2010 selalu tumbuh di atas Nasional.



\*Asumsi dalam APBN P 2016  
\*\* Proyeksi ekonomi Jawa Barat

19

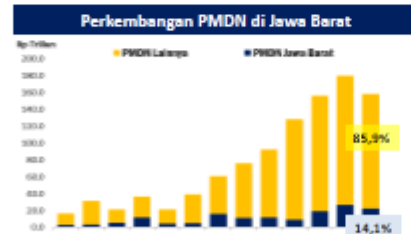
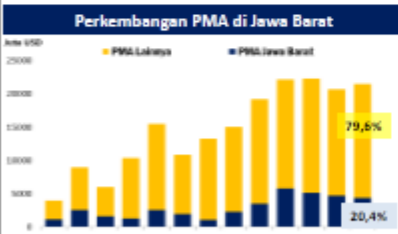
Pertumbuhan dua sektor utama (industri pengolahan dan perdagangan) di tahun 2016 diperkirakan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan historisnya (2011-2015), sedangkan sektor pertanian diperkirakan tumbuh di atas rata-rata historisnya.



## Investasi Jawa Barat

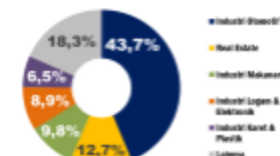
20

Saling dengan terbatasnya pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4% dan PMDN mencapai 14,1%

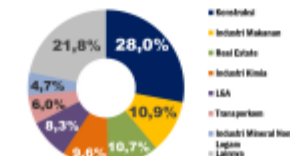


Sumber: BKPM RI (Realisasi) \*) s.d. Tw III 2016

### Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat

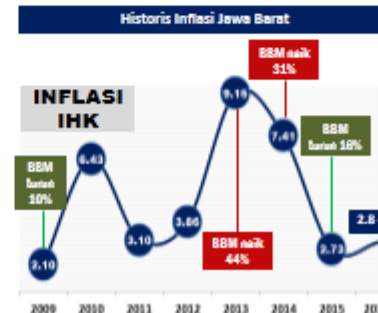


### Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat



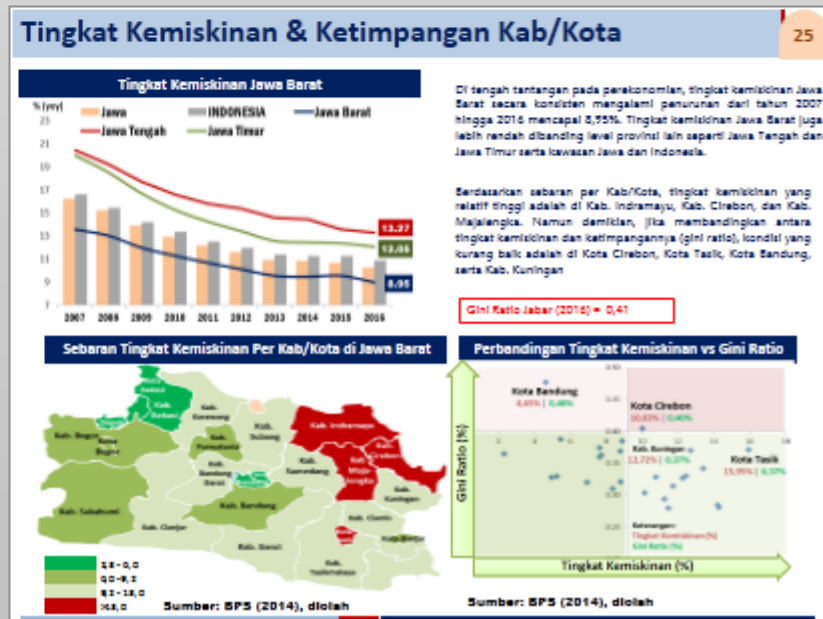
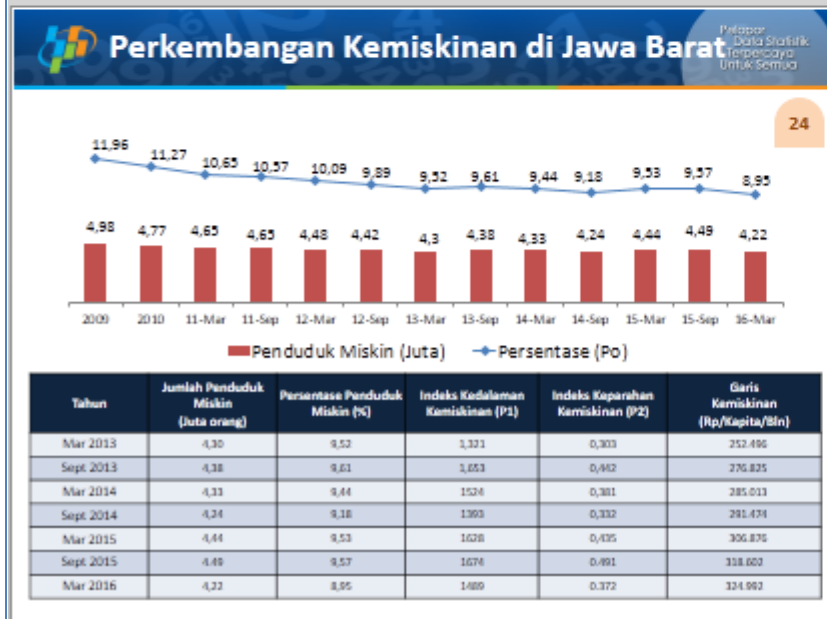
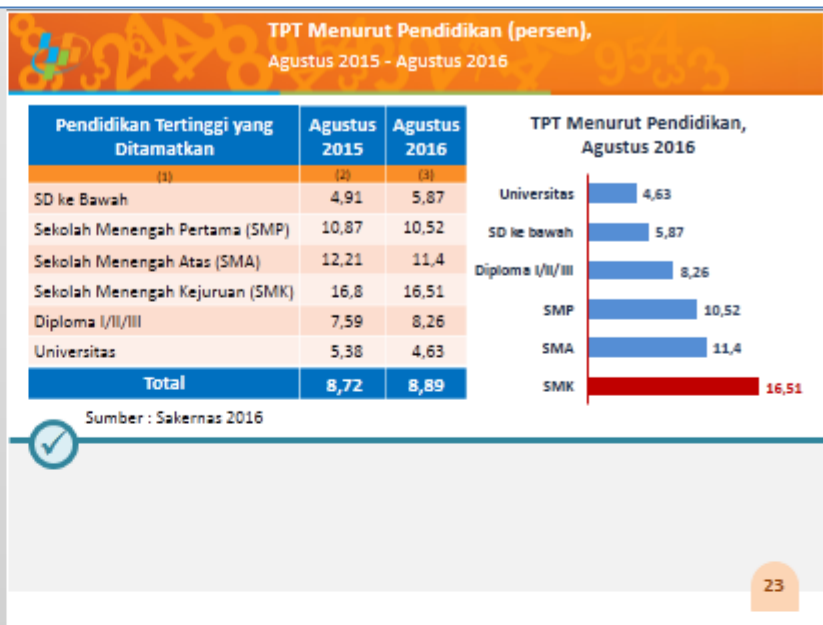
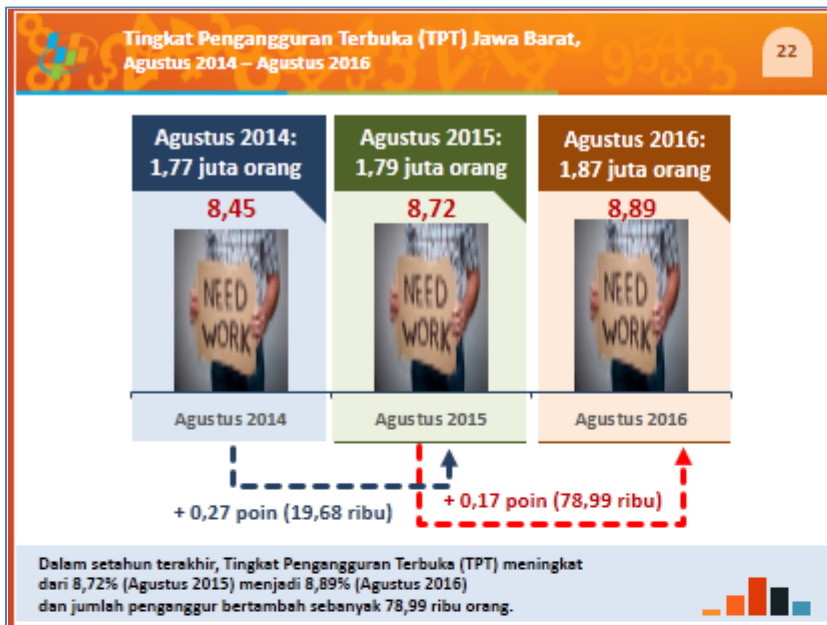
## Inflasi Jawa Barat

Inflasi Jawa Barat masih terkendali dalam level yang cukup rendah. Hal ini seiring dengan tren core inflation yang menurun. Inflasi Jawa Barat pada akhir tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 2,6– 3,2% (yoy). Adapun komoditas yang memiliki frekuensi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar serta dengan andil yang juga tergolong besar adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Komoditas-komoditas ini menjadi fokus utama Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi daerah.



Sumber: BPS dan Proyeksi BI

# Pengangguran dan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2016



## 3 Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu

### Target RPJMD Jawa Barat 2013-2018

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya strata Posyandu multifungsi



Posyandu terbangun (2015):  
20857 dari 50374 Posyandu

= **41,4%**

Masih tersisa 4.143  
posyandu yang perlu  
direvitalisasi demi  
mencapai target 49,63%  
pada tahun 2015  
(target 2015 **BELUM  
TERCAPAI**)

Tahun	Target Revitalisasi Posyandu	
	(unit)	(persen)
2014	15.000	29,77
2015	25.000	49,63
2016	35.000	69,48
2017	45.000	89,33
2018	50.000	99,26

Untuk mencapai target revitalisasi  
50.000 posyandu, maka **BEBAN**  
Kabupaten/Kota hingga Tahun  
2018: **29.143 Posyandu**



# CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

## 5 Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan

Rencana: 3.860 Desa  
Realisasi: 3.855 Desa

5 desa di Kab. Sumedang dan 1.451 desa jml bantuannya diluar 100 juta

Rencana: 5.321 Desa  
Realisasi: 5.315 Desa

5 desa di Kab. Sumedang, dan 1 desa di Kab. Cirebon tidak mengajukan

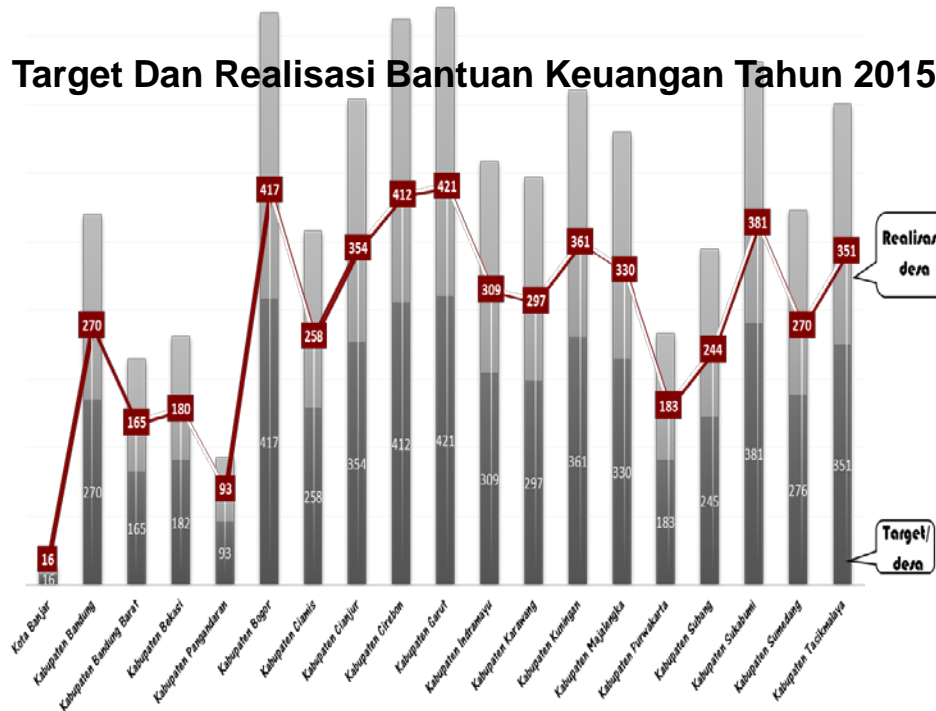
Rencana: 5.321 Desa  
Realisasi: 5.312 Desa

6 desa di Kab. Sumedang, dan 1 desa di Kab. Subang tidak mengajukan 2 desa di Kab. Bekasi berubah status menjadi kelurahan

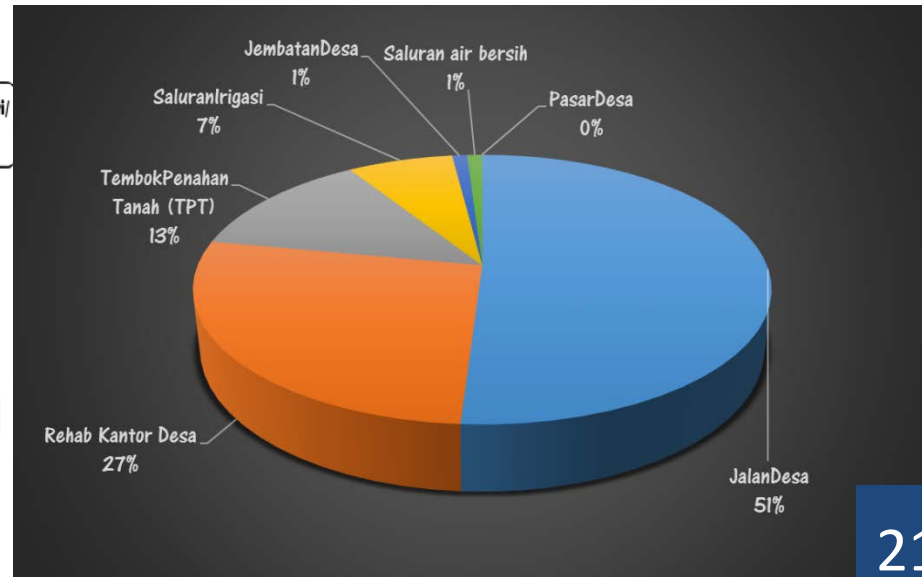
19 KABUPATEN MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2015 TOTAL 5.321 DESA SAJUDAH JUMLAH DANA



Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2015



## CAPAIAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN TAHUN 2015



# CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

## RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI (RUTILAHU)

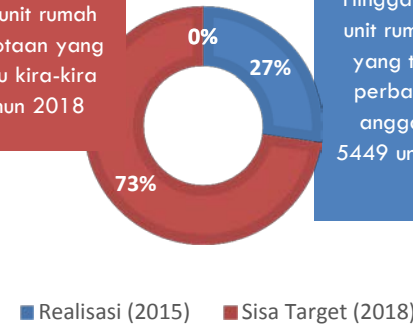
6 Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin



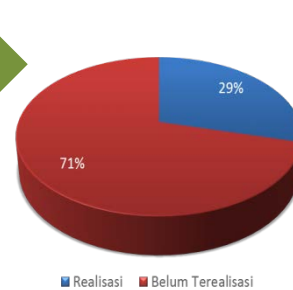
Perkotaan  
20 ribu unit

Perdesaan  
80 ribu unit

Masih tersisa 14551 unit rumah tidak layak huni perkotaan yang belum diperbaiki atau kira-kira 73% dari target tahun 2018



Hingga tahun 2015, jumlah unit rumah tidak layak huni perkotaan yang telah mendapatkan perbaikan menggunakan anggaran murni adalah 5449 unit atau 27,25% dari target 2018



Hingga tahun 2014, jumlah unit rumah tidak layak huni pedesaan yang mendapatkan perbaikan mencapai 23.260 unit atau sebesar 29% dari target 2018 sebesar 80.000 unit, dengan realisasi anggaran per 2014 sebesar 232,6 milyar.

## ISU-ISU PEMBANGUNAN RUTILAHU



Penghuni rumah mengeluhkan kurangnya keterampilan tukang dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni



Ketidaktepatan pemerintah desa/BKM dalam menghitung material bangunan, seperti bata, semen, dan pasir, sehingga masih ada rumah yang perbaikannya kurang maksimal



Daya tahan bangunan kurang baik (plafon bocor, tembok belum sampai tahap finishing, dan terjadi kerusakan pada usia bangunan yang baru 2 tahun



Kualitas bangunan antara penerima bantuan yang satu dengan lainnya tidak merata, ada yang hasil perbaikannya maksimal dan kurang maksimal



Ketidaksesuaian target anggaran RKPD dengan target anggaran RPJMD per tahunnya

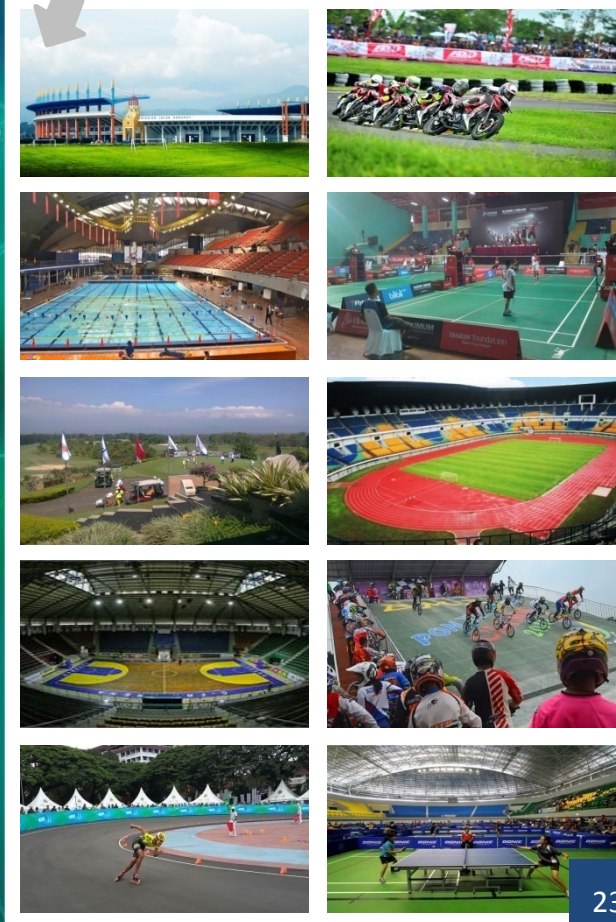


# CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

## GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN & KOTA



8 Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten/Kota





**3**

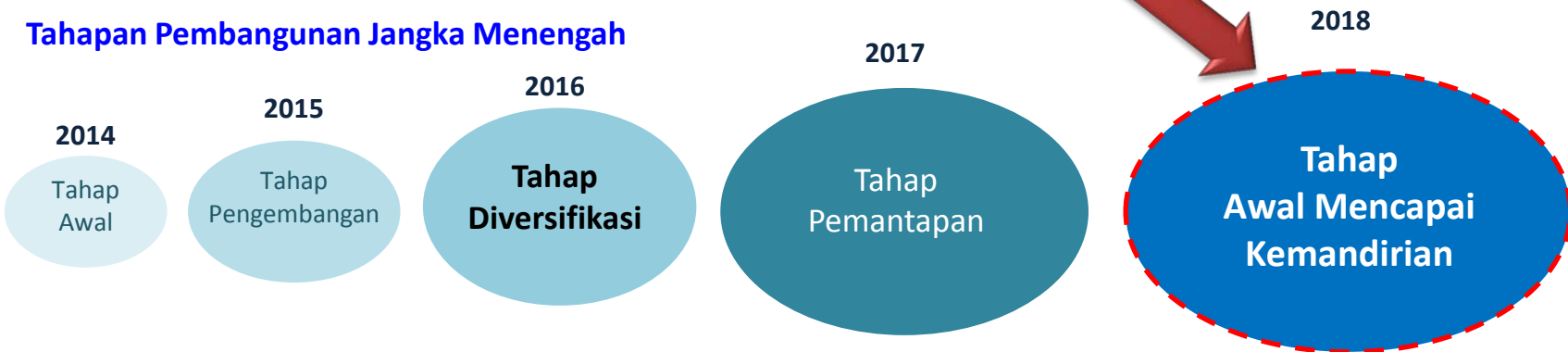
**Arah Kebijakan  
Pembangunan Tahun 2018**

# TAHAPAN PEMBANGUNAN

## Tahapan Pembangunan Jangka Panjang



## Tahapan Pembangunan Jangka Menengah





# SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DENGAN RPJMN TAHUN 2015 -2019

## 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

## RPJMD JAWA BARAT 2013-2018

## 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN

- C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
- C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5)
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5)
3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7)
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5)
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)
10. CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2), (C3), (C4)

- FOKUS 1 :  
PEMBANGUNAN  
SEKTOR  
UNGGULAN**
- Kedaulatan Pangan
  - Energi
  - Ketenagalistrikan
  - Kemaritiman
  - Pariwisata

- FOKUS 2 :  
PEMBANGUNAN  
KEBUTUHAN  
DASAR**
- Pendidikan
  - Kesehatan
  - Perumahan

- 17 SDGs**
1. Tanpa Kemiskinan
  2. Tanpa Kelaparan
  3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
  4. Pendidikan Berkualitas
  5. Kesetaraan Gender
  6. Air Bersih dan Sanitasi
  7. Energi Bersih dan Terjangkau
  8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
  9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
  10. Mengurangi Kesenjangan
  11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
  12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
  13. Aksi Terhadap Iklim
  14. Kehidupan Bawah Laut
  15. Kehidupan di Darat
  16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
  17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

- FOKUS 3 :  
PENGURANGAN  
KESENJANGAN**
- Antar kelompok Pendapatan
  - Antar Wilayah



# PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 DAN 2016 SERTA TARGET TAHUN 2017 dan 2018

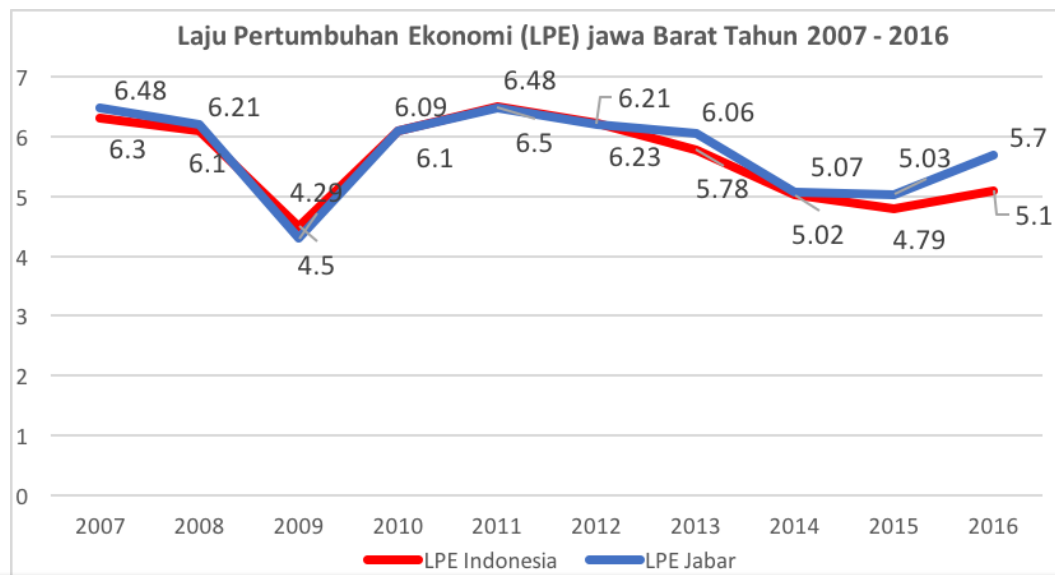
No	INDIKATOR	LKPJ 2015	LKPJ 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
1.	a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	46.709.569	47.379.389	48.366,9	49.169,7
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,47	1,43	-	-
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.06 (5.04)	5,67	6,3 - 6,9	6,4 – 7,0
3.	Inflasi (%)	2.73	2.75	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0
4.	Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah)	32,64	34,88	26,00 – 28,00	28,00 – 30,00
5.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	9,57	8,77	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
6.	Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb)	29,53	7,65	-	-
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,72	8,89	7,00 - 6,50	6,50 – 6,00
8.	Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)	396.36 (382.99)	412.30	267,2 - 287,2	315,3 - 335,3



# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018

Indikator	Satuan	Target		
		2016	2017	2018
Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,3 – 6,9	6,3 – 6,9	6,4 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,50 – 7,00	7,00 - 6,50	6,50 – 6,00
Angka kemiskinan	Persen	5,90– 5,00	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
Gini Ratio	Poin	0,36 – 0,35	0,35 – 0,34	0,34 – 0,33

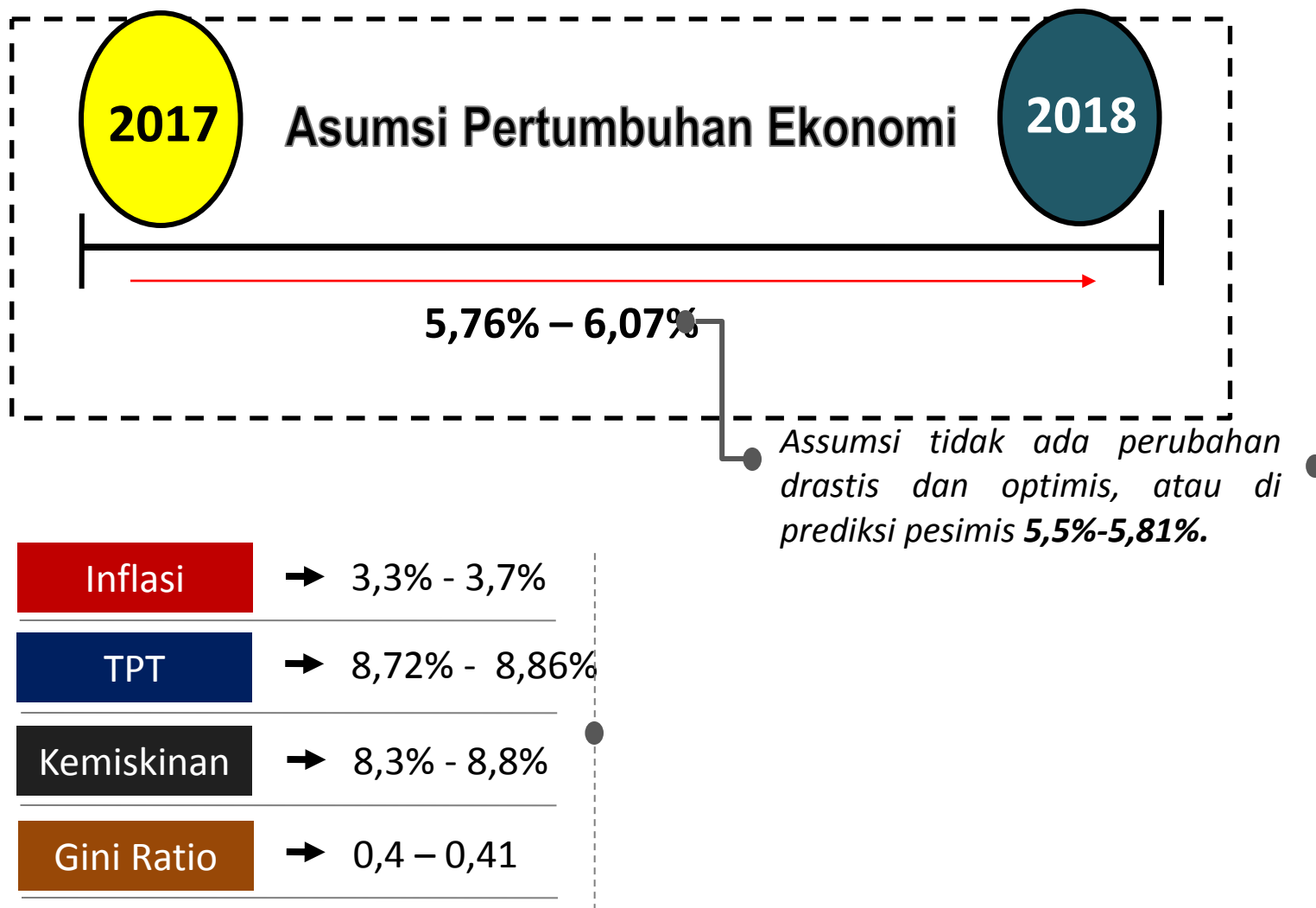
Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya sebesar 5,1% .



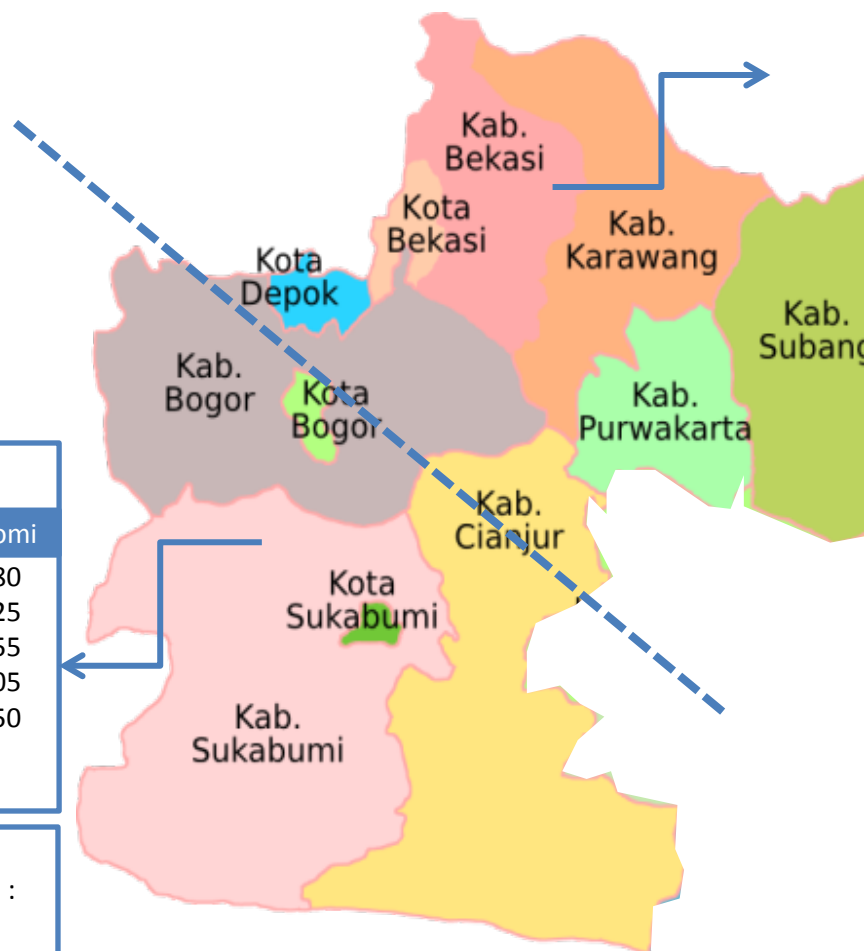
# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018



Sumber: Tim Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Jawa Barat



# DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN 6,4 – 7,0 PERSEN (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH PADA TAHUN 2018



## Wilayah I :

### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bogor : 6,80
2. Kabupaten Sukabumi : 5,25
3. Kabupaten Cianjur : 5,55
4. Kota Bogor : 6,05
5. Kota Sukabumi : 5,50
6. Kota Depok : 6,78

### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

## Wilayah II :

### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bekasi : 7,00
2. Kabupaten Purwakarta : 7,61
3. Kabupaten Subang : 5,15
4. Kabupaten Karawang : 7,00
5. Kota Bekasi : 6,50

### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Transportasi dan pergudangan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



# DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN 6,4 – 7,0 PERSEN (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH PADA TAHUN 2018

## Wilayah IV :

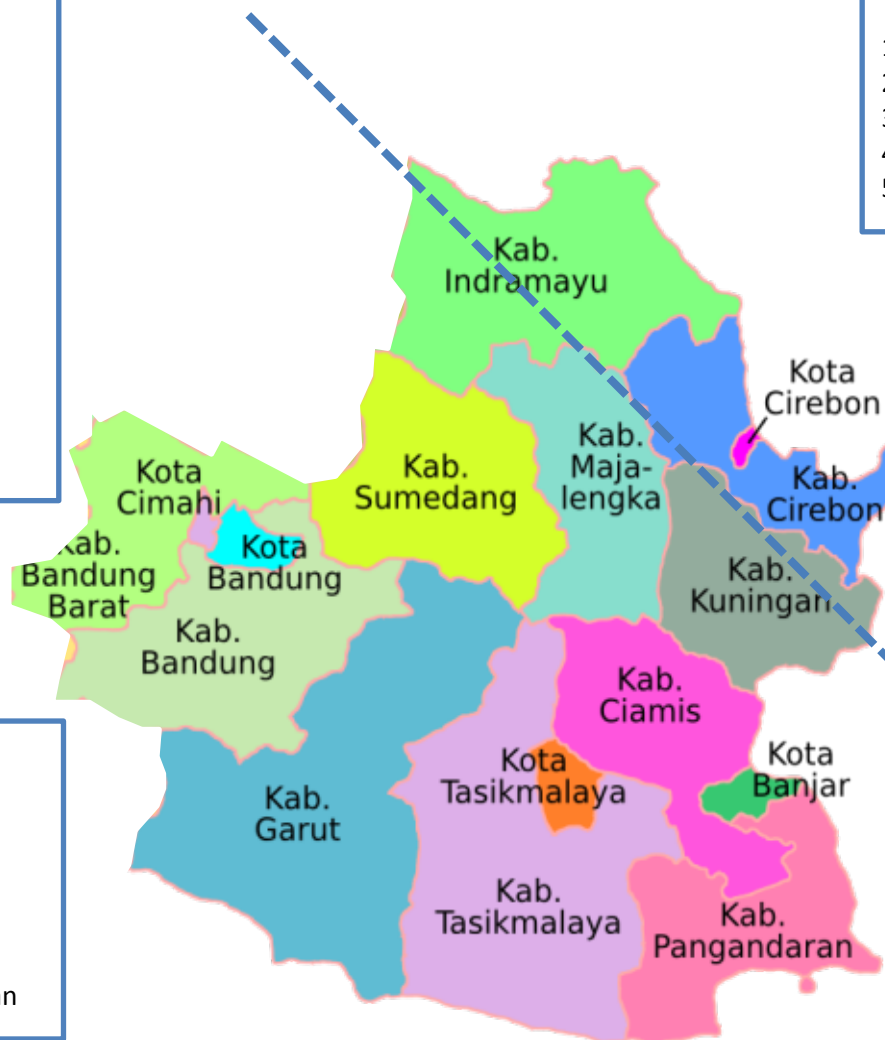
### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bandung : 7,38
2. Kota Bandung : 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat : 5,70
4. Kota Cimahi : 5,75
5. Kabupaten Sumedang : 5,69
6. Kabupaten Garut : 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya : 5,50
8. Kota Tasikmalaya : 5,50
9. Kabupaten Ciamis : 5,02
10. Kota Banjar : 5,35
11. Kabupaten Pangandaran : 5,00

## Wilayah III :

### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Cirebon : 6,00
2. Kabupaten Indramayu : 6,29
3. Kabupaten Majalengka : 5,49
4. Kabupaten Kuningan : 5,00
5. Kota Cirebon : 5,75



### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Transportasi dan pergudangan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Transportasi dan pergudangan
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5. Pertambangan dan penggalian



# PRIORITAS LOKASI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN



Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka membutuhkan peran Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten kota.



Penurunan tingkat kemiskinan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (diatas 10 persen) dan memiliki jumlah penduduk miskin yang besar.



Penurunan tingkat pengangguran diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi (diatas 5 persen) dan memiliki jumlah tingkat pengangguran yang besar.



Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran juga diprioritaskan ke daerah yang memiliki rasio gini yang relatif besar.





# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

No	Kab/Kota	Target RPJMD LPE
		2018
1	Kota Depok	6,78
2	Kabupaten Bogor	6,80
3	Kota Bogor	6,05
4	Kabupaten Sukabumi	5,25
5	Kota Sukabumi	5,50
6	Kabupaten Cianjur	5,55
7	Kabupaten Bekasi	7,00
8	Kota Bekasi	6,50
9	Kabupaten karawang	7,00
10	Kabupaten Purwakarta	7,61
11	Kabupaten Subang	5,15
12	kabupaten Cirebon	6,00
13	Kota Cirebon	5,75
14	Kabupaten Kuningan	5,00
15	Kabupaten Majalengka	5,49

No	Kab/Kota	Target RPJMD LPE
		2018
16	Kabupaten Indramayu	6,29
17	Kabupaten Bandung	7,38
18	Kota Bandung	6,00
19	Kabupaten Bandung Barat	5,70
20	Kota Cimahi	5,75
21	Kabupaten Sumedang	5,69
22	Kabupaten Garut	5,17
23	Kabupaten Tasikmalaya	5,50
24	Kota Tasikmalaya	5,50
25	Kabupaten Ciamis	5,02
26	Kota Banjar	5,35
27	Kabupaten Pangandaran	5,00

Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



# TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

## BKPP I

### Wilayah I :

#### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bogor	: 6,80
2. Kabupaten Sukabumi	: 5,25
3. Kabupaten Cianjur	: 5,55
4. Kota Bogor	: 6,05
5. Kota Sukabumi	: 5,50
6. Kota Depok	: 6,78

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

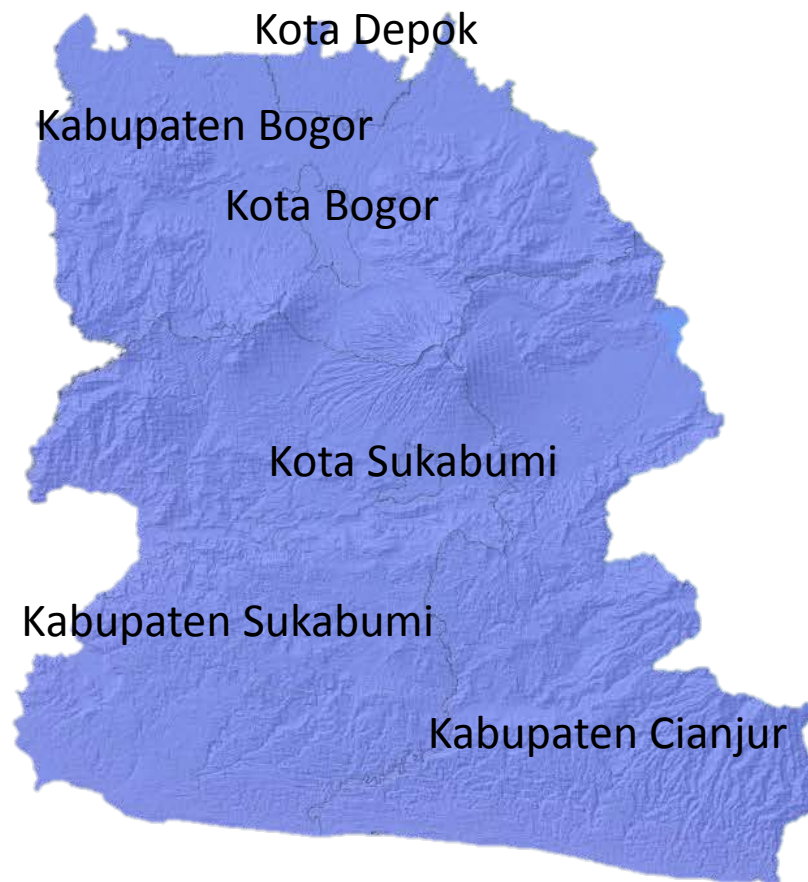
1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Bogor	: 8,50
2. Kabupaten Sukabumi	: 7,24
3. Kabupaten Cianjur	: 7,92
4. Kota Bogor	: 7,06
5. Kota Sukabumi	: 7,50
6. Kota Depok	: 8,56

### Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bogor	: 4,00
2. Kabupaten Sukabumi	: 4,50
3. Kabupaten Cianjur	: 7,50
4. Kota Bogor	: 5,00
5. Kota Sukabumi	: 5,00
6. Kota Depok	: 2,20



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



# TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

## BKPP II

### Wilayah I :

#### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bekasi	: 7,00
2. Kabupaten Purwakarta	: 7,61
3. Kabupaten Subang	: 5,15
4. Kabupaten Karawang	: 7,00
5. Kota Bekasi	: 6,50

#### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Bekasi	: 8,02
2. Kabupaten Purwakarta	: 7,23
3. Kabupaten Subang	: 6,82
4. Kabupaten Karawang	: 9,00
5. Kota Bekasi	: 9,20

### Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bekasi	: 3,50
2. Kabupaten Purwakarta	: 4,50
3. Kabupaten Subang	: 6,45
4. Kabupaten Karawang	: 5,50
5. Kota Bekasi	: 3,50



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



# TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

## BKPP III

### Wilayah III :

#### Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Cirebon	: 6,00
2. Kabupaten Indramayu	: 6,29
3. Kabupaten Majalengka	: 5,49
4. Kabupaten Kuningan	: 5,00
5. Kota Cirebon	: 5,75

### Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Cirebon	: 7,92
2. Kabupaten Indramayu	: 8,40
3. Kabupaten Majalengka	: 5,55
4. Kabupaten Kuningan	: 2,27
5. Kota Cirebon	: 8,52

### Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

### Target Kemiskinan

1. Kabupaten Cirebon	: 8,00
2. Kabupaten Indramayu	: 8,50
3. Kabupaten Majalengka	: 8,14
4. Kabupaten Kuningan	: 7,25
5. Kota Cirebon	: 5,00



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



# TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

## BKPP IV



**Wilayah IV :**

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

**Target Tingkat Pengangguran Terbuka**

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

**Target Kemiskinan**

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat

# Tema Pembangunan

**2014**

Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera

**2015**

Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

**2016**

Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global

**2017**

Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

**2018**

*Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju **Kemandirian Masyarakat***



## A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- 1) Ketahanan pangan;
- 2) Kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 3) Pengangguran; dan
- 4) Ketahanan keluarga.

## B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:

- 1) Pemerataan, perluasan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas, akses dan sistem pelayanan kesehatan;
- 3) infrastruktur strategis, infrastruktur desa dan perdesaan, ;

## C. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:

- 1) Aksesibilitas, kualitas, daya saing, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;
- 2) Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM);
- 3) Prestasi pemuda dalam lingkup nasional dan internasional;
- 4) Pemilihan Kepala Daerah 2018;
- 5) Akuntabilitas kinerja aparatur;
- 6) Pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga;
- 7) Lingkungan hidup dan penataan ruang;

# PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

## ***1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan***

- a. Wajib belajar 12 tahun.
- b. Pendidikan Vokasional.
- c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif.
- d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru.
- e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus.
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

## ***2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan***

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
- b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
- c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
- d. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- e. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna.

## ***3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan***

- a. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.
- b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi.
- c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.
- d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
- e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan.
- f. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.

## ***4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata***

- a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
- b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja.
- c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian.
- d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha.
- e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal

## ***5. Peningkatan ketahanan pangan***

- a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai.
- b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan.
- c. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh.
- e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan

## ***6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri***

- a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang.
- c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.
- d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.

## ***7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan***

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance).
- b. Meningkatnya kesadaran hukum.
- c. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL)

## ***8. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana***

- a. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan.
- c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum.
- e. Meningkatnya kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana

## ***9. Penanggulangan kemiskinan***

- a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.
- b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin

## ***10. Peningkatan penataan ruang daerah (F)***

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang.
- b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang

## ***11. Peningkatan Kualitas kependudukan***

- a. Meningkatnya ketahanan keluarga.
- b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG).
- c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan

# SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

## INDIKASI KEGIATAN

2.1.1. Penguatan rumah sakit milik Provinsi

2.1.2. Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

2.1.3. Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

2.1.4. Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

## KEGIATAN PRIORITAS

-----

-----

-----

-----

### Catatan :

Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan **POHON KINERJA**

## PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

### (SASARAN 1)

2.1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

### (SASARAN 5)

2.5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

## PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

### (SASARAN 2)

2.2. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

### (SASARAN 4)

2.4. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

### (SASARAN 3)

2.3. Peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

# Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

## PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

### SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan
2.1.1 Penguatan rumah sakit milik Provinsi	2.1.2 Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi	2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah	2.1.4 Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi
Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi
-----	-----	-----	-----
KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Dibahas Pada:  
**FORUM PERANGKAT DAERAH** →

**CONTOH**

Contoh:

## Highlight Indikasi Kegiatan : 2.1.3 Perluasan Pelayanan Kesehatan

### PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

#### SASARAN PRIORITAS

2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

#### INDIKASI KEGIATAN

2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

#### KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Puskesmas PONED
2. Pengadaan Alat Kesehatan
3. dst

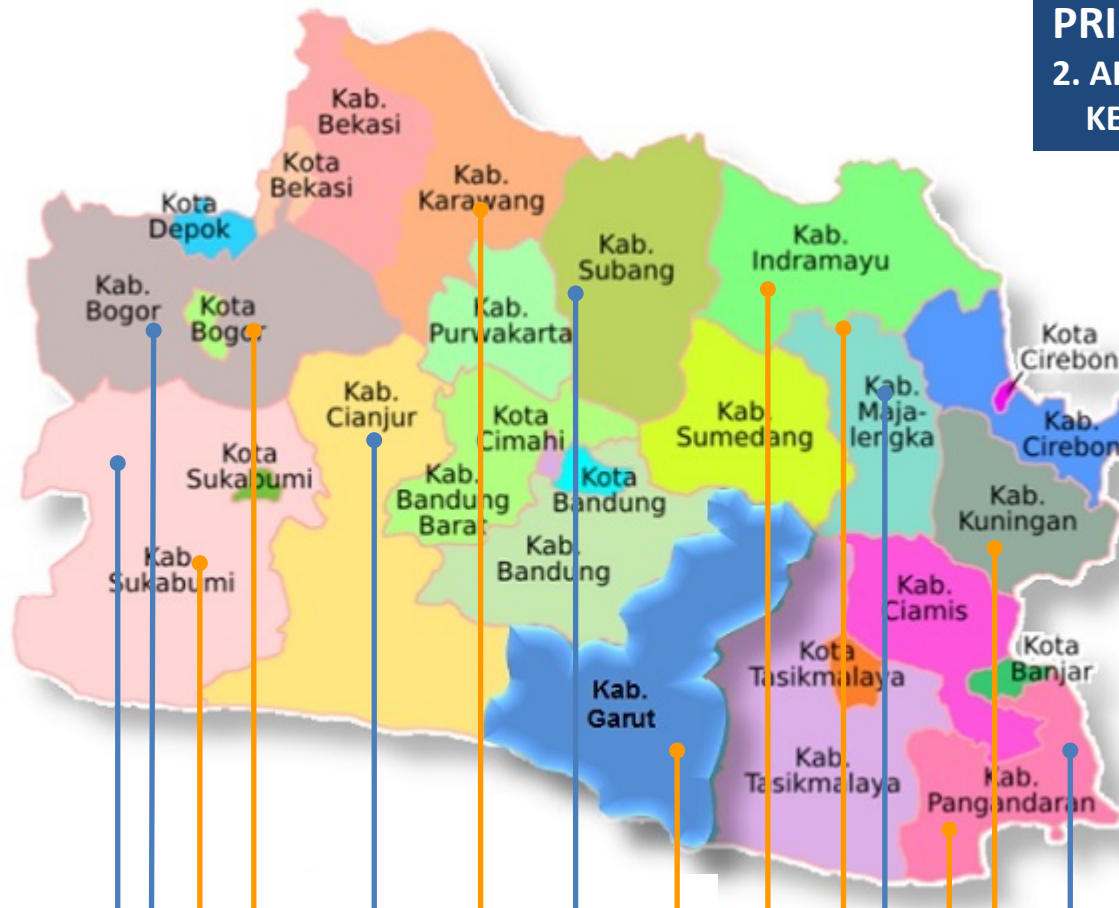
Dibahas Pada  
FORUM PERANGKAT DAERAH

#### INDIKASI LOKASI



# **HIGHLIGHT** Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

**PRIORITAS PEMBANGUNAN :  
2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN  
KESEHATAN**



**1. Pembangunan Puskesmas PONED**

**2. Pengadaan Alat Kesehatan**



# SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

## INDIKASI KEGIATAN

3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

3.1.2 Pembangunan Rutilahu

3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan



## KEGIATAN PRIORITAS

-----

-----

-----

-----

**Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan**



### Catatan :

Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan **POHON KINERJA**

# Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

**PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan**

**SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan**

**Indikasi Kegiatan**  
3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

**Indikasi Lokasi**  
.....

**KEGIATAN PRIORITAS**  
.....  
.....  
.....

**Indikasi Kegiatan**  
3.1.2 Pembangunan Rutilahu

**Indikasi Lokasi**  
.....

**KEGIATAN PRIORITAS**  
.....  
.....  
.....

**CONTOH**

**Indikasi Kegiatan**  
3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan

**Indikasi Lokasi**  
.....

**KEGIATAN PRIORITAS**  
.....  
.....  
.....

*Dibahas Pada :*  
**FORUM PERANGKAT DAERAH** →

# Highlight Indikasi Kegiatan :

## 3.1.2 Pembangunan Rutilahu Perkotaan

### PRIORITAS PEMBANGUNAN :

3. *Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan*

#### SASARAN PRIORITAS

3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

#### INDIKASI KEGIATAN

3.1.2 Pembangunan Rutilahu

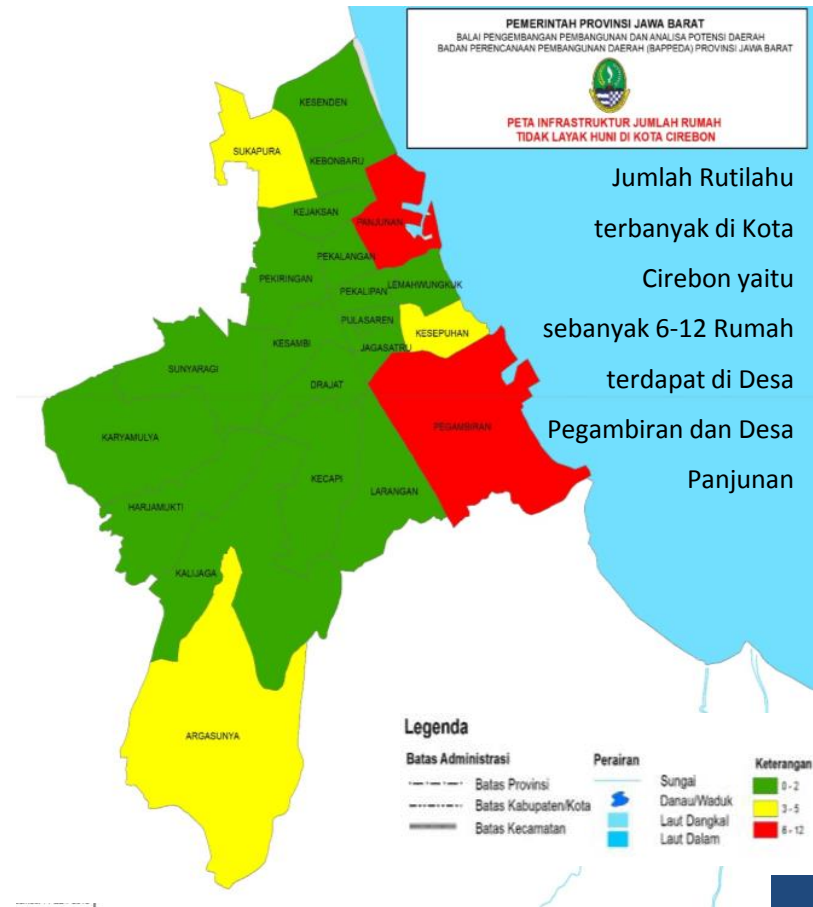
#### KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan

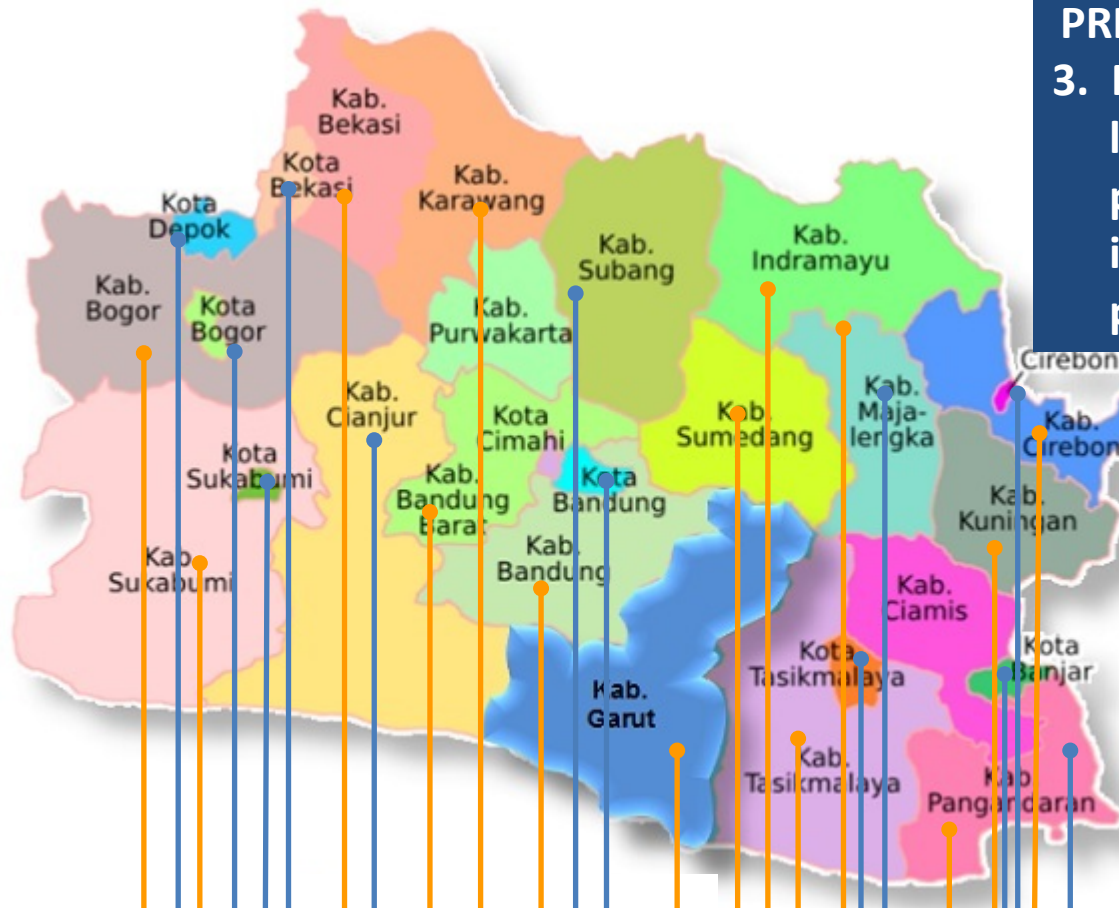
2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan

**Dibahas Pada  
FORUM PERANGKAT DAERAH**

#### INDIKASI LOKASI



# **HIGHLIGHT** Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



**PRIORITAS PEMBANGUNAN :**  
**3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan**

**1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan**

**2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan**



**4**

## **Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018**

# KEBIJAKAN PENDANAAN 2018

## PENDAPATAN

1. Memantapkan Kelembagaan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Koordinasi Pusat-Daerah;
4. Meningkatkan Deviden BUMD;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;
7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

## PEMBIAYAAN

### A. Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahunan

### B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal;
2. Kredit Cinta Rayat (KCR)

## BELANJA

1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance;
2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.
6. **Pendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak**
7. **Pendukung dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi**
8. **Pendukung Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII**
9. **Pemberian penghargaan bagi insan olahraga**



# Kriteria Substansi Usulan Kegiatan Prioritas

## Perangkat Daerah

1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018).
2. Hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 berupa Pendukung dan Penuntasan kegiatan unggulan dan Prioritas Pembangunan Provinsi.
3. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2018 (RPJMN 2015-2019).
4. Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
5. Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU).
6. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)).
7. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.
- 8. Pendukung persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.**
9. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.

## Kabupaten/Kota

1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018).
2. Komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau tindak lanjut MoU.
3. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%).
- 4. Pendukung persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.**



**5**

## **Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018**

# Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017

NO.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembukaan Rangkaian Musrenbang	16 Februari 2017	BKPP III Cirebon Provinsi Jawa Barat
2.	Musrenbang Kabupaten/Kota	16 Februari – 10 Maret 2017	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3.	Forum Perangkat Daerah	14 - 17 Maret 2017	PD Provinsi Jawa Barat
4.	Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi	23 Maret 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
5.	Pra Musrenbang (Pohon Kinerja)	27 Maret – 01 April 2017	
	Wilayah I (BKPP Wilayah Bogor)	27 Maret 2017	Botani Square
	Wilayah II (BKPP Wilayah Purwakarta)	29 Maret 2017	Jatiluhur
	Wilayah III (BKPP Wilayah Cirebon)	30 Maret 2017	Kantor BKPP III
	Wilayah IV/Priangan Barat	31 Maret 2017	Kantor Pemkab Pangandaran
	Wilayah IV/Priangan Timur	01 April 2017	Kantor Pemkab Pangandaran
6.	Rakor Bidang Tindaklanjut Pra Musrenbang (Pohon Kinerja)	03 – 04 April 2017	Terserah Bidang Bappeda
7.	Rapat Koordinasi Teknis Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Kabupaten/Kota	06 April 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
8.	Virtual Musrenbang	10 April 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
9.	Musrenbang Provinsi	11 – 13 April 2017	Tentatif
10.	Pasca Musrenbang (BL) bersama TAPD	Tentatif	Bappeda Provinsi Jawa Barat

# Tahapan Perencanaan Provinsi

## Jawa Barat

3 – 4 April 2017

Rakor Bidang  
Bappeda  
Provinsi

Belanja  
Langsung

BTL  
Top Down

Draft Ranwal  
RKPD 2018

Rancangan  
Awal RKPD  
2018

Rancangan  
Awal RKPD  
2018

Draft  
Rancangan  
RKPD 2018

Draft  
Rancangan  
RKPD 2018

Draft  
Rancangan  
RKPD 2018

Rancangan  
RKPD 2018

Rancangan  
Akhir RKPD  
2018

16 Februari 2017

13 – 17 Maret 2017

23 Maret 2017

27 Maret – 1 April 2017

6 April 2017

10 April 2017

11-13 April 2017

1  
Pembukaan  
Rangkaian  
Musrenbang  
RKPD

2  
Forum  
Perangkat  
Daerah

3  
Forum  
Gabungan  
Perangkat  
Daerah

4  
Pra  
Musrenbang  
Provinsi

5  
Rakortek  
Bappeda  
Provinsi &  
Kab/Kota

6  
Virtual  
Musrenbang  
Provinsi

7  
MUSRENBANG  
Provinsi

8  
Pasca  
MUSRENBANG  
Provinsi

BTL  
Bottom Up

Musrenbang  
Kabupaten/  
Kota

17 Feb – 10 Maret 2017

Belanja  
Langsung

BTL  
Bottom Up

BTL  
Bottom Up

BTL  
Bottom Up

BTL  
Bottom Up

BTL  
Bottom Up

BTL  
Top Down

Belanja  
Langsung

BTL  
Top  
Down



# PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2018

## SISTEM PERENCANAAN



[rkpdjabaronline.jabarprov.go.id](http://rkpdjabaronline.jabarprov.go.id)

## SISTEM PENGANGGARAN



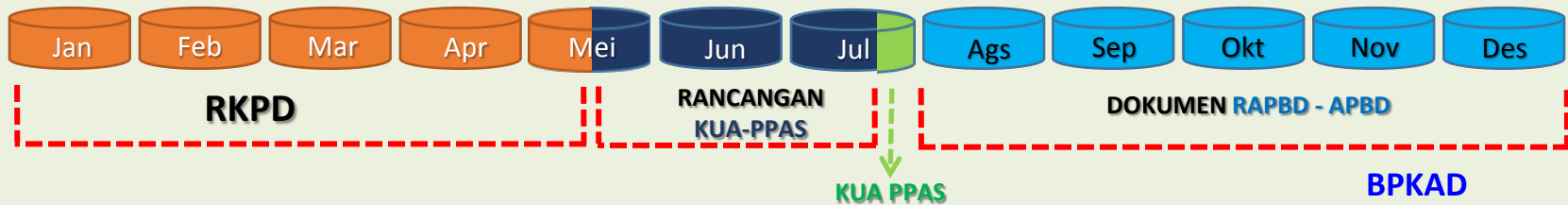
[ppasjabaronline](http://ppasjabaronline)



Aplikasi  
RKA/DPA

**TAPD**

Online ?



e-SAKIP  
(Biro Organisasi)



e-MONEV  
(Bappeda)



SIPKD  
(BPKAD)



# RENCANA TINDAK LANJUT

## PERANGKAT DAERAH/BIRO PROVINSI

1. PD/Biro yang baru terbentuk, atau yang berubah nomenklatur dan tupoksi agar **SEGERA** menyusun dokumen Rencana Strategis (**RENSTRA**) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018;
2. **Verifikasi** Penyusunan Renstra oleh Bappeda Provinsi akan dilaksanakan pada **27 – 28 Februari 2017**;
3. Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan **mengacu** kepada **11 Prioritas Pembangunan** Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
4. Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menelaah kegiatan yang sifatnya **BTL Top Down**;
5. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal (13 – 17 Maret 2017)

## KABUPATEN/KOTA

1. **Menyusun dokumen RKPD** Kabupaten/Kota 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKP Pemerintah Pusat;
2. Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada **11 Prioritas Pembangunan** Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 melalui **RKPDJabar Online 2101**;
3. Melaksanakan **Musrenbang Kabupaten/Kota** sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku.





MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN

# SATU DATA

## PEMBANGUNAN JAWA BARAT

*Sukses Perencanaan Sukses Implementasi*



# TERIMA KASIH

**SMS JABAR** MEMBANGUN  
0811 200 5500

**Informasi lebih lanjut :**

- Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  
Jalan Diponegoro No.22 Bandung  
Telp. (022) 4204483
- Bappeda Provinsi Jawa Barat  
Jalan. Ir H.Juanda No. 287  
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731  
Website : <http://www.jabarprov.go.id>, [www.bappeda.jabarprov.go.id](http://www.bappeda.jabarprov.go.id)

**RKPDJabar** -ONLINE

[www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id](http://www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id)

**KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE**

**SMS SATU DATA JABAR**  
08778 200 5500  
Contoh: RLS\*JAWA  
BARAT\*2011#